

SKRIPSI

**ANALISIS KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH (SIMDA) KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Utara)**

**Oleh:
Elga M. Langi
NIM : 15 043 071**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO - JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Laporan Keuangan.....	8
2.2 Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	17
2.4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	19
2.5 Penggunaan SIMDA Sesuai Peraturan Perundang Undangan ..	23
2.6 Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Sumber Data.....	29

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	34
1. Sejarah Kantor BPKAD Provinsi Sulut	34
2. Visi dan Misi Instansi	35
3. Struktur Organisasi	36
4. Uraian Pekerjaan	36
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
1. Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Sulut.....	40
4.3 Analisis Kualitas Laporan Keuangan BPKAD	52
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang yang memiliki tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor publik, swasta, dan koperasi. Perkembangan pada sektor public tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Seiring perkembangan Akuntansi *Sektor* Publik di Indonesia, maka wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan Lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada public (Soimah, 2014).

Pengelolaan Keuangan Negara dengan mengeluarkan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 Tentang Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya Laporan Keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut: “Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.”

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk system informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan. SIMDA keuangan dirancang oleh

badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis kinerja.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan daerah. Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan Kualitas laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggara pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Sehingga dengan begitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Dan dengan diberlakukannya SIMDA Keuangan ini apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.

Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan

tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku internal auditor dan Pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjawab tuntutan tersebut di atas sekaligus memfasilitasi Pemerintah daerah dengan merancang suatu sistem informasi terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Walaupun secara umum banyak manfaat yang ditawarkan oleh penerapan SIMDA Keuangan antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, namun kualitas laporan keuangan terhadap penggunaan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado masih terhambat oleh sumber daya manusia. Masih terdapat Sumber Daya Manusia yang tidak paham dalam penerapan SIMDA Keuangan.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: Xu *et al.* (2003); Nugraha dan susanti (2010); Winidyaningrum dan Rahmawati (2010). Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah, penelitian ini menarik untuk meneliti kembali faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran

ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan sektor publik masih relatif sedikit, karena bidang pemerintahan masih terbilang baru dalam dunia akuntansi Indonesia, berbeda dengan pada sektor swasta. Pada sektor swasta, kualitas laporan keuangan dapat dilihat hanya dari laporan keuangan yang bersifat kuantitatif yang biasanya tercermin dalam laba atau *earnings*, sedangkan pada sektor publik, penilaian atas kualitas laporan keuangan tidak dapat dinilai hanya dari laporan keuangan yang dihasilkan saja atau dari faktor yang bersifat kuantitatif. Dilihat dari komponen laporan keuangan antara sektor swasta dan sektor publik, komponen dalam laporan keuangan sektor publik memang lebih rumit dan kompleks, hal ini mengakibatkan perbedaan persepsi atas kualitas laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014). Karakteristik kualitatif yang disyaratkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penelitian terdahulu menurut Ihsanti (2014) tentang Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan

pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode periode sebelumnya. Selanjutnya penelitian Safrida, Nadirsyah, dan Usman (2010) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh. Penelitian terdahulu menurut Ihsanti (2014) Kompetensi SDM dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Semakin ber-kompeten SDM yang ada maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian terdahulu Nugraha, Hasil evaluasi penilaian kualitas laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Keuangan menunjukkan kenaikan nilai rata-rata tertimbang dari kriteria relevan sebesar 59,64% yang berarti informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA Keuangan lebih berkualitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SIMDA Keuangan meningkat karena aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan laporan keuangan dan segala bukti pendukung yang lebih lengkap, cepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk memantau posisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014).

Artinya adalah teknik keuangan akuntan secara alami telah mendapat perhatian oleh fungsi pelayanan khusus. Laporan keuangan menghasilkan gambaran penelitian yang dipercaya. Bagaimana penelitian itu bekerja dalam

setahun, dan dalam bentuk apa penelitian itu berlangsung sekarang. Tekanan selalu menuai pernyataan mengenai penghasilan dan pengeluaran, neraca dan arus kas nantinya.

Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak member opini atau tidak member pendapat (Disclaimer). Ketika Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berarti Laporan Keuangan yang dilaporkan oleh pihak Daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan Laporan Keuangan. Diawal penerapannya sistem ini (SIMDA) masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan, akan tetapi output yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur daripada penyusunan dengan sistem manual.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang Kualitas Laporan Keuangan terhadap penggunaan SIMDA keuangan di BPKAD Provinsi Sulut, maka peneliti mengambil judul “Analisis Kualitas Informasi Laporan Keuangan menggunakan SIMDA Keuangan Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:

Bagaimana Kualitas Informasi Laporan Keuangan terbaru yang dihasilkan dari Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah; Mengetahui Kualitas Informasi Laporan Keuangan terbaru yang dihasilkan dari Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kemajuan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pemerintah Kota
2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota sebagai bahan evaluasi kualitas dan referensi dari penerapan SIMDA.
3. Akademisi dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian berikutnya.